

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG
PADA KAMPUNG ERAGAMA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik
Guna mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan*



Disusun oleh,

AGUS SURABUT
NIM 2015-10-002

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG
PADA KAMPUNG ERAGAMA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas Penulis,

NAMA : AGUS SURABUT

NIM : 2015-10-002

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H.MUHAMMAD ALI,S.Sos,M.Si
NIDN. 1417056701

H.AGUS SUMARYADI,S.Pt.M.Si
NIDN.1212116701

Mengetahui :

Ketua Program Studi

SITI KHIKMATUL RIZQI,S.IP, M.Si
NIDN. 1201037702

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG
PADA KAMPUNG ERAGAMA DISTRIK KURULU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi

Pada hari tanggal2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

.....
NIDN.

.....
NIDN.

Anggota

Anggota

.....
NIDN.....

.....
NIDN.

Mengetahui,

Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL,M.Pd
NIP.19700408 199702 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2. Bapak H.Muhammad Ali,S.Sos,M.Si dan Bapak H.Agus Sumaryadi,S.Pt,M.Si selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
3. Ibu Siti Khikmatul Rizqi, S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail,M.Pd selaku dosen wali yang telah menuntun penulis dari semester awal hingga semester akhir
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
6. Bapak Yulisu Sorabut selaku Kepala Kampung Eragama yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
7. Orangtuaku tercinta Ayahanda Wilem Sorabut dan Ibunda Yuspina Marian yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta adik-adikku Novi Sorabut dan Otalina Sorabut yang selalu membantu

8. Istriku tercinta Paulina Wamu dan anakku Afila Sorabut yang dengan sabar , dan penuh kasih sayang mendukung penulis
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Angkatan 2015/2016 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Juni 2020

Penulis,

AGUS SURABUT
NIM. 2015-10-002

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Analisis	8
2. Pengertian Pengelolaan	9
3. Pengertian Alokasi Dana Kampung	10
4. Konsep Pengelolaan Dana Kampung.....	11
a. Perencanaan	12
b. Pelaksanaan	15
c. Penatausahaan	18
d. Pelaporan	20
e. Pertanggungjawaban	21
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Definisi Operasional	25
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	27
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN.....	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Populasi.....	28
D. Instrumen Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Hasil Penelitian	32
1. Keadaan Lokasi penelitian	32
2. Keadaan responden.....	39
3. Analisa	42
B. Pembahasan	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

AGUS SURABUT-----NIM. 2015-10-002, “Analisis Pengelolaan Dana Kampung Pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya (Pembimbing I: H. Muhammad Ali dan Pembimbing II : H. Agus Sumaryadi)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana kampung pada Kampung Eragama Kabupaten Jayawijaya, dengan dibatasi pada indikator: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Subyek penelitian terdiri dari 17 orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana kampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan studi pustaka. Analisa data menggunakan nilai rata-rata (*mean*), frekuensi dan persentase yang disajikan dalam tabel.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan pengelolaan dana kampung cukup baik.

Dari lima (5) indikator yang diteliti, indikator tertinggi adalah pelaporan, dan indikator terendah adalah penatausahaan dengan sub indikator terendah adalah Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur dan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang.

Kata kunci : Pengelolaan, Dana Kampung

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi dana Kampung Eragama.....	4
Tabel 3.1	Interpretasi nilai rata-rata	31
Tabel 4.1	Keadaan responden berdasarkan usia.....	39
Tabel 4.2	Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidika	40
Tabel 4.3	Keadaan responden berdasarkan status sosial.....	41
Tabel 4.4	Keadaan responden berdasarkan pengabdian.....	41
Tabel 4.5	Keterlibatan kepala kampung, perangkat kampung, BMK..... Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat Perencanaan	42
Tabel 4.6	Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK	43
Tabel 4.7	Penyusunan rencana kerja kampung yang dibuat	44
Tabel 4.8	Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah	45
Tabel 4.9	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung	46
Tabel 4.10	Pelaksanaan program yang telah ditetapkan	47
Tabel 4.11	Koordinator tenaga pengelola keuangan kampung	48
Tabel 4.12	pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana di terima ...	49
Tabel 4.13	Pengelolaan dana dilakukan secara transparan	50
Tabel 4.14	Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi.....	51
Tabel 4.15	Penunjukan bendahara kampung sebagai penatausahaan	52
Tabel 4.16	pencatatan setiap transaksi	53
Tabel 4.17	Penyertaan bukti-bukti transaksi	53
Tabel 4.18	Penggunaan buku kas dalam pelaporan	54
Tabel 4.19	Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang	55
Tabel 4.20	Pelaporan pengelolaan dana kampung	56
Tabel 4.22	Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu	57
Tabel 4.23	Kepala kampung langsung melaporkan	58
Tabel 4.24	Pengelolaan dana kampung dilakukan secara transparan	59
Tabel 4.25	Kemampuan kepala kampung dalam menjelaskan	60

Tabel 4.26 Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis	61
Tabel 4.27 Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan	61
Tabel 4.28 Informasi tentang pengelolaandana kampung.....	62
Tabel 4.29 Laporan disampaikan secara jujur apa adanya.....	63
Tabel 4.30 Nilai rata-rata indikator perencanaan	64
Tabel 4.31 Nilai rata-rata indikator pelaksanaan	66
Tabel 4.32 Nilai rata-rata indikator penatausahaan	67
Tabel 4.33 Nilai rata-rata indikator pelaporan	69
Tabel 4.34 Nilai rata-rata indikator pertanggungjawaban.....	70
Tabel 4.35 Rekapitulasi nilai rata-rata indikator pengelolaan dana	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kampung Eragama	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Identitas responden
Lampiran 3	Hasil pengukuran indikator perencanaan
Lampiran 4	Hasil pengukuran indikator pelaksanaan
Lampiran 5	Hasil pengukuran indikator penatausahaan
Lampiran 6	Hasil pengukuran indikator pelaporan
Lampiran 7	Hasil pengukuran indikator pertanggungjawaban
Lampiran 8	Surat Penelitian dari LPPM
Lampiran 9	Surat rekomendasi dari Kepala Kampung Eragama
Lampiran 10	Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana kampung yang dibagikan ke seluruh kampung di Indonesia. Dana kampung tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana kampung sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Pemerintah kampung merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan di kampung memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap kampung dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan oleh pemerintah kampung agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kampung dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur kampung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah kampung diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan, pertanggungjawaban, kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah kampung. Oleh sebab itu, Kepala Kampung maupun perangkat kampung diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah kampung agar menjadi lebih baik. Sehingga program-

program yang telah direncanakan oleh pemerintah kampung berjalan dengan efektif dan efisien.

Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kampung, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah kampung. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya, No. 4 tahun 2007 pasal 14: Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik kampung, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi kampung. Selebihnya sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan kampung, BPK, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung yang diakui oleh kampung. (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 lebih dipertegas lagi tentang prioritas penggunaan dana kampung sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dana kampung memiliki beberapa prioritas mengenai pemanfaatan dana kampung tersebut. Dalam Peraturan Menteri tersebut diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung pemberdayaan masyarakat kampung. Ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana kampung tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di kampung.

Tujuan dana kampung disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut (Nurcholis, 2011) :

1. Meningkatkan kesejahteraan seutuhnya bagi masyarakat kampung;
2. Meratakan berbagai infrastruktur pelayanan kampung yang ada di kampung;
3. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di kampung;
4. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan subjek pembangunan di kampung;
5. Perdayakan masyarakat kampung seutuhnya di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab kampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Melalui Peraturan Menteri Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dana kampung memiliki beberapa prioritas.

Prioritas tersebut diharapkan agar kampung memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana kampung tersebut.

Salah satu kampung yang telah menerima Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Jayawijaya adalah Kampung Eragama yang terletak di Distrik Kurulu. Kampung Eragama terletak kurang lebih 200 Km dari Ibukota Kabupaten.

Dana alokasi kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi kampung dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung yang telah di terima Pemerintah Kampung Eragama, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat di sajikan dalam tabel 1.1 berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	2016	890.570.000	Digunakan untuk perbaikan jalan kampung, pemberian bantuan bibit ternak
2.	2017	980.750.000	Digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan program pembinaan pemuda kampung
3.	2018	1.375.450.000	Digunakan untuk pembangunan rumah sehat bagi masyarakat, dan pembangunan jembatan dari Distrik Kurulu ke Kampung Eragama
Jumlah Total Anggaran Dalam 3 Tahun		3.246.770.000	

Sumber Data : Kampung Eragama, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, terlihat pada tahun 2016 diperoleh dana sebesar Rp 890.570.000. Dari dana tersebut sebanyak 50 % digunakan untuk perbaikan jalan kampung, 20 % untuk pemberian bantuan ternak berupa babi kepada masyarakat, dan 30 % digunakan untuk kelembagaan Kampung Eragama. Pembangunan jalan kampung

merupakan program strategis yang direncanakan oleh pemerintahan kampung, karena jalan yang ada kurang layak untuk dilalui.

Pada tahun 2017 dana alokasi kampung yang diterima sebesar Rp 980.750.00. Pemerintahan Kampung mengalokasikan dana 50 % untuk pembangunan fasilitas public yang terdiri dari pembangunan Gereja, 20 % untuk program pembinaan pemuda kampung, terutama bagi pemuda – pemudi Kampung Eragama yang tidak atau putus sekolah dengan mendirikan taman belajar, sisanya 30 % digunakan untuk pembayaran gaji perangkat kampung dan pembiayaan kelembagaan kampung.

Pada tahun 2018 dana alokasi kampung yang diterima lebih besar yaitu Rp 1.375.450.000. Dari dana tersebut sebesar 40 % digunakan untuk pembangunan rumah sehat bagi perangkat kampung dan masyarakat yang terdiri dari rumah sehat bagi perangkat kampung 3 rumah dan masyarakat 2 rumah, 30 % digunakan untuk pembangunan jembatan dari Distrik Kurulu ke Kampung Eragama, sisanya 30 % digunakan untuk pembiayaan kelembagaan Kampung Eragama (sumber data : wawancara dengan Kepala Kampung Eragama, 2018)

Dari alokasi dana kampung yang telah dilakukan oleh pemerintahan kampung Eragama, beberapa program tidak terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak semua masyarakat Kampung Eragama menerima bantuan, seperti bantuan bibit ternak babi tidak semua masyarakat mendapatkannya. Program pembinaan bagi pemuda – pemudi kampung tidak melibatkan semua pemuda-pemudi yang ada. Dan pembangunan rumah sehat molor dari waktu yang ditentukan (sumber data : wawancara dengan masyarakat Kampung Eragama, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan aparat kampung yang mengatakan tidak semua program dapat berjalan dengan baik, sebab keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki perangkat kampung, maka perencanaan dalam melakukan program seringkali tidak sesuai

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga penyerapan dana kampung tidak sepenuhnya terserap baik.

Dalam pelaksanaan program, tidak semua program dilaksanakan pada saat dana kampung tersebut dikucurkan, karena ada program yang dilaksanakan setelah 6 bulan dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat (sumber data : wawancara dengan masyarakat Kampung Eragama, 2019)

Dalam penatausahaan, yang bertugas adalah sekretaris kampung dan Bendahara, namun tidak semua transaksi dapat dicatat dengan baik, seperti transaksi pembelian barang yang tidak disertai dengan nota, atau nota-nota pembelian yang tercecer.

Dalam hal pelaporan penggunaan dana kampung, perangkat kampung terkadang masih bingung dengan tata cara pembuatan laporan karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dalam membuat laporan terkadang molor atau tidak tepat waktu dan masih membutuhkan bantuan orang dari luar dalam hal pembuatan laporan.

Dalam hal pertanggungjawaban, laporan yang diberikan kepada Bupati terkadang terlambat karena disebabkan oleh sumber daya perangkat kampung yang terbatas.

Widagdo, Widodo, dan Ismail, Tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, hasil penelitian menunjukkan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan.

Ngongare, di tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan

Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh yang tujukan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa, hasil penelitian juga menemukan kompetensi yang masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah di atasnya. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya”.

B. Batasan Masalah

Untuk menfokuskan penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi permasalahannya yang dibahas agar memudahkan penulis untuk menganalisa lebih mendalam sehingga penelitian ini diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan alokasi Dana Kampung, adapun masalah yang dapat dibatasi menyangkut, 1. perencanaan, 2. pelaksanaan, 3. penatausahaan, 4. pelaporan dan 5. pertanggungjawaban

C. Rumusan Masalah

Dengan uraian-uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah, Bagaimanakah Pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

Secara akademis Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

1. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan tentang pengelolaan dana kampung pada kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi suatu bahan untuk perbaikan dalam pengelolaan dana kampung, khususnya untuk pemerintah Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Analisis

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *analisis* yang artinya melepaskan.

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.

Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantaranya adalah:

- a. Menurut Komaruddin (2008:3), analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- b. Menurut Syahrul (2002:12) Pengertian analisis dalam akuntansi adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos

atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

- c. Menurut Mohammad Afdi Nizar (2004) pengertian analisis dalam akuntansi adalah evaluasi mengenai kondisi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan sebuah perbedaan akan muncul.

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
- b. Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
- c. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya
- d. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya

2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari kata *manajement* (Bahasa Inggris). Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, Istilah Inggris tersebut lalu menjadi Manajemen atau menejemen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- 1) Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola;
- 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;

4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Murniati (2005:21) pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun tekhnikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Dibawah ini beberapa kutipan pengertian-pengertian pengelolaan menurut para ahli :

- 1) Robert T. Kiyosaki dan Sharon L (1994:214), pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.
- 2) Balderton (Adisasmita,2011:162), pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- 3) Soekanto (2002:61) pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan
- 4) Atmosudirjo (2007:28), pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu

3. Pengertian Alokasi Dana Kampung

Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Kampung ini diberikan untuk mengganti program pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Kampung, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap kampung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing kampung. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Kampung secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Kampung ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

4. Konsep Pengelolaan Dana Kampung

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Kampung terintegrasi dengan APB Kampung yang merupakan pengelolaan keuangan kampung.

Dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana kampung, disebutkan bahwa penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung, dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana kampung diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung. Didalamnya disebutkan tahapan - tahapan pengelolaan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, sebagai berikut :

a. Perencanaan

Menurut Handoko (2008:32) perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dari untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus memperetimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan atau tindakan (Suharto, 2010: 71).

Lembaga Administrasi Negara merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut :

- 1) Pengertian Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- 2) Pengertian Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 3) Pengertian Perencanaan yaitu usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari pengertian perencanaan di atas, memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan, sebagai berikut :

- a) Penentuan pilihan secara sadar berkaitan dengan tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b) Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
- 2) Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- 3) Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Kampung seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kampung dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung.

Proses perencanaan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung). Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) ini akan menentukan arah pembangunan

kampung dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan (RKP Kampung) ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah kampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan kampung untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung yang diatur melalui Peraturan Kampung.

Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKP Kampung, dibutuhkan peran dari pemerintah kampung untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan Informan dan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung).

Pemerintah kampung menyusun perencanaan pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pengelolaan kampung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Kampung dan Badan Musyarah Kampung (BMK)

- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Kampung dievaluasi oleh Bupati selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Distrik harus melakukan penyempurnaan selama 7 (tujuh) hari jika Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Kampung dinyatakan Rancangan Peraturan Kampung (Raperdes) tidak sesuai dan
- 4) Prioritas penggunaan dana kampung ditetapkan dalam musyawarah kampung antara Badan Musyawarah Kampung (BMK), Pemerintah Kampung dan Unsur Masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan dalam pengelolaan dana kampung adalah proses perencanaan pengelolaan dana kampung yang diselenggarakan Pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung (BMK) dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian dana kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung. Maka dalam perencanaan pengelolaan dana kampung pihak-pihak yang ikut dalam perencanaan pengelolaan dana kampung adalah Sekretaris Kampung, Kepala Distrik, Badan Musyawarah Kampung (BMK) dan Unsur Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat.

b. Pelaksanaan

Menurut Westra (2003:82) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Tjokroadmudjoyo(2007:23) pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal

dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian (2008:38) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung termasuk di dalamnya terdapat Dana Kampung dilaksanakan oleh Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK). Kepala kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di kampung, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD), wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Kampung kepada setiap kampung dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Asas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 meliputi :

1) Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Kampung

2) Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsure masyarakat kampung

4) Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan kampung harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu :

1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung atau sesuai ketetapan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah

2) Pemerintahan Kampung dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung

3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 4) Pengadaan barang/jasa di Kampung diatur dengan Peraturan Bupati dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan disahkan Kepala kampung

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 4 tahun 2016 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung dibantu oleh Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK).

c. Penatausahaan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah Kampung Eragama disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.

Penatausahaan dalam pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu :

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara kampung
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir tahun
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Distrik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan
- 6) Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, bukti transaksi (kuitansi, nota faktur, memo) dan buku Bank

Menurut Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara kampung, bendahara kampung wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di

kampung eragama menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa/kampung (*siskeudes*).

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah kampung eragama yang bernama *Siskeudes* (sistem keuangan desa). Sistem Keuangan Desa/kampung (*Siskeudes*) ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa/kampung (*siskeudes*) ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya;

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 2) Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBK.
- 3) Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBK dan dilakukan dengan Rekening Kas Kampung.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kampung Eragama, menurut beberapa informan: Pernyataan beberapa informan diatas menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kampung Eragama. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah kampung hanya menerapkan prinsip *urgensi* atau kepentingan saja. Belum adanya kriteria-kriteria tertentu untuk dapat melakukan persetujuan perubahan anggaran. Peran dari pemerintah

kampung disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah Kampung Eragama:

- a. Buku kas umum
- b. Buku pembantu pajak
- c. Buku pembantu bank
- d. Buku pemasukan

Penatausahaan dalam pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik kampung.

Tugas bendahara dalam pengelolaan Dana Kampung yaitu :

- 1) Menerima
- 2) Menyimpan
- 3) Menyetorkan
- 4) Membayar
- 5) Menatausahakan dan
- 6) Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung)

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan kampung, Pemerintah Kampung wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Kepala Distrik maupun ke Bupati. Disamping itu pemerintah kampung dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Kampung sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung), hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Kampung. Informan juga menjelaskan demikian. Laporan realisasi Dana Kampung setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan kampung termasuk di dalamnya Dana Kampung, Kepala Kampung wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Kampung dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Kampung dilaporkan kepada BPD.

Proses pelaporan pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung. Kepala kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung) ke Bupati/Walikota melalui Kepala Distrik berupa Laporan Semester I dan Semester II.

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK) Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah adalah sebuah konsep etika yang berhubungan administrasi public pemerintahan. Pertanggungjawaban merupakan kemampuan untuk memberikan jawaban, kemampuan

untuk menjelaskan kondisi yang dialami atas berbagai aktivitas yang dilakukan.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Kampung yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Kampung. Penyampaian laporan realisasi Dana Kampung secara tertulis oleh Kepala Kampung (pemerintah kampung) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung :

1) Tranparansi dan Akuntabilitas

Tranparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

1.a Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah kampung eragama memberikan

informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut beberapa informan:

Berdasarkan uraian dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi yang dibangun oleh pemerintah kampung eragama menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependudukan dan data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui, papan pengumuman di Kantor Kampung, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT.

1.b Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung. Mekanisme laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dilampiri sebagai berikut :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK)
- 2) Format laporan kekayaan milik kampung per 31 Desember
- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK) disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan mengenai topik serupa antara lain :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Referensi
1	Kartika, et al, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja	Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi,	Jurnal Prodi Administrasi Publik Unud Vol 4 No.7

			akuntabilitas, dan prinsip <i>value of money</i> belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.	
2	Rahayu, 2017	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja.	Jurnal UNS Vol.2 No.1, 2017

			<p>Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut:</p> <p>mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			kebijakan pembangunan.	
3	Aidil, Amanda Fitra, 2016	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	mendapatkan temuan yakni penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Kemudian pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Pelaporan penggunaan Dana Desa di desa	Jurnal ugm Vol.2 No.5 2016

			Panggunharjo selain dilakukan secara manual yaitu mencatat transaksi ke dalam Buku Kas umum, juga secara komputerisasi yaitu mencatat transaksi menggunakan aplikasi siskeudes.	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. Definisi Operasional

Dari hasil kajian di atas yang berkaitan dengan variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu : Analisis Pengelolaan Dana Kampung, maka penulis memberikan definisi secara operasional. Analisis pengelolaan dana kampung adalah kegiatan membandingkan, mencocokkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi kampung oleh Pemerintah Kampung Eragama Distrik Kurulu dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan benar.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah penyusunan kegiatan yang akan dilakukan baik fisik dan nonfisik yang melibatkan Kepala Kampung Eragama, Badan Musyawarah Kampung (BMK) Eragama, perwakilan Tokoh Agama Kampung Eragama dan Tokoh Masyarakat Kampung Eragama yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Kampung Eragama (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Eragama (APB).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan untuk melaksanakan rencana-rencana atau program-program fisik dan nonfisik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kampung (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Eragama (APB) kampung dengan Kepala Kampung Eragama sebagai pemegang kekuasaan dan menunjuk Sekretaris Kampung Eragama sebagai Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK) untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan Dana Kampung melalui Rekening Kampung untuk diberikan kepada Bendahara Kampung Eragama untuk disimpan dalam Kas Kampung dan digunakan untuk pembiayaan, pengadaan barang/jasa di Kampung Eragama

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Kampung Eragama dalam penggunaan dana kampung mulai dari menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, dengan menyertakan bukti berupa kuintansi dan nota faktur serta melakukan tutup buku setiap akhir bulannya dan melaporkannya kepada Kepala Kampung.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau penggunaan dana kampung oleh Kepala Kampung Eragama secara periodic kepada Kepala Distrik maupun Bupati.

e. Pertanggungjawaban

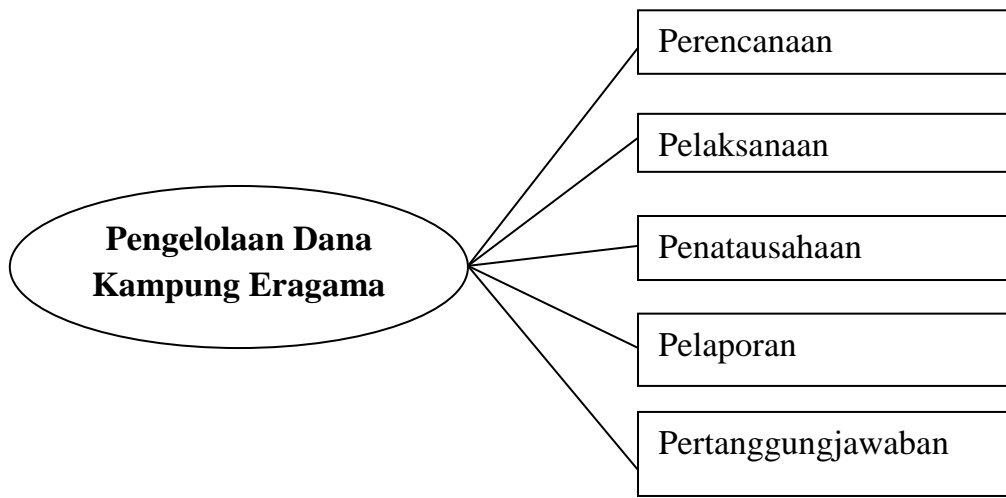
Pertanggungjawaban adalah kewajiban dari Pemerintah Kampung Eragama, khususnya Kepala Kampung Eragama dalam melaporkan realisasi kegiatan dari pengelolaan dana kampung yang digunakan secara terbuka, jujur, kepada Kepala Distrik Kurulu, Bupati Jayawijaya dan masyarakat Kampung Eragama.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, maka kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Mengacu pada gambar diatas, maka penulis menganalisis pengelolaan dana kampung dengan indikatornya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah \pm 2 bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang diteliti yaitu pengelolaan dana kampung.

C. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Populasi adalah keseluruhan proses pengelolaan dana kampung mulai dari dana diterima oleh Pemerintah Kampung Kampung Eragama sampai dengan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menjawab penelitian ini, sumber data diambil dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan dana kampung, mulai dari uang

dicairkan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kampung Eragama.

Jadi sumber penelitiannya berjumlah 17 orang yang terdiri dari 7 orang Aparat Kampung Eragama yang melakukan pengelolaan dana kampung, yang terdiri dari 7 orang BMK, 2 orang dari Unsur Agama dan 1 orang dari Unsur Masyarakat.

D. Instrumen Penelitian

Menurut **Sugiyono (2008:16)**, mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban menggunakan skala likert, sebagai berikut :

	Bobot
a. Tidak baik	1
b. kurang baik	2
c. Cukup baik	3
d. Baik	4

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a) Pengamatan (observasi)

Observasi atau pengamatan adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis atau dapat dikatakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian.

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen tentang pengelolaan dana kampung ataupun catatan-catatan transaksi dana kampung tersebut dipergunakan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.

c) Angket (kuesioner)

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan/membagikan daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden.

Kuisisioner dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana kampung. Kuisisioner tersebut dibagi untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama.

c) Studi pustaka

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku, diktat bahan kuliah dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini. Teknik studi pustaka ini digunakan untuk melengkapi teori-teori atau penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam penelitian tentang pengelolaan dana kampung.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara membandingkan nilai rata-rata (mean) hasil pengukuran dengan skala pengukuran yang digunakan (nilai bobot). Selain itu juga menggunakan

frekuensi untuk menggambarkan sebaran responden berdasarkan jawabannya.

Kesimpulan penelitian dilakukan menggunakan metode tiga kotak (*Three Box Method*), yaitu mengkategorikan hasil pengukuran menjadi tiga, kemudian diberi predikat atau arti (Ferdinand, 274:2011)

Tabel acuan untuk menyimpulkan penelitian menggunakan metode tiga kotak, disajikan pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tabel Interpretasi Nilai Rata-Rata Hasil Pengukuran

No.	Jika	Arti
1.	$1 \leq \text{skor rata-rata} \leq 2$	Kurang baik
2.	$2 < \text{skor rata-rata} \leq 3$	Cukup baik
3.	$3 < \text{skor rata-rata} \leq 4$	Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a. Topografi Kampung Eragama

Kampung Eragama merupakan salah satu kampung yang berada di Wilayah Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya. Kampung Eragama merupakan daerah yang terdiri dari rawa-rawa. Kampung Eragama mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Wadanku
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Musatfak
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Wosi
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan distrik Witawaya

b. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kampung Eragama berjumlah 1.428 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 698 jiwa dan perempuan sebanyak 730 jiwa (sumber data : Kantor Kampung Eragama, 2019)

c. Keadaan Sosial Kampung Eragama

1) Pendidikan

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kampung Eragama terdiri dari 1 PAUD dan 1 SD Negeri.

2) Kesehatan

Terdapat 1 Puskesmas yang melayani kesehatan penduduk Kampung Eragama.

3) Ekonomi

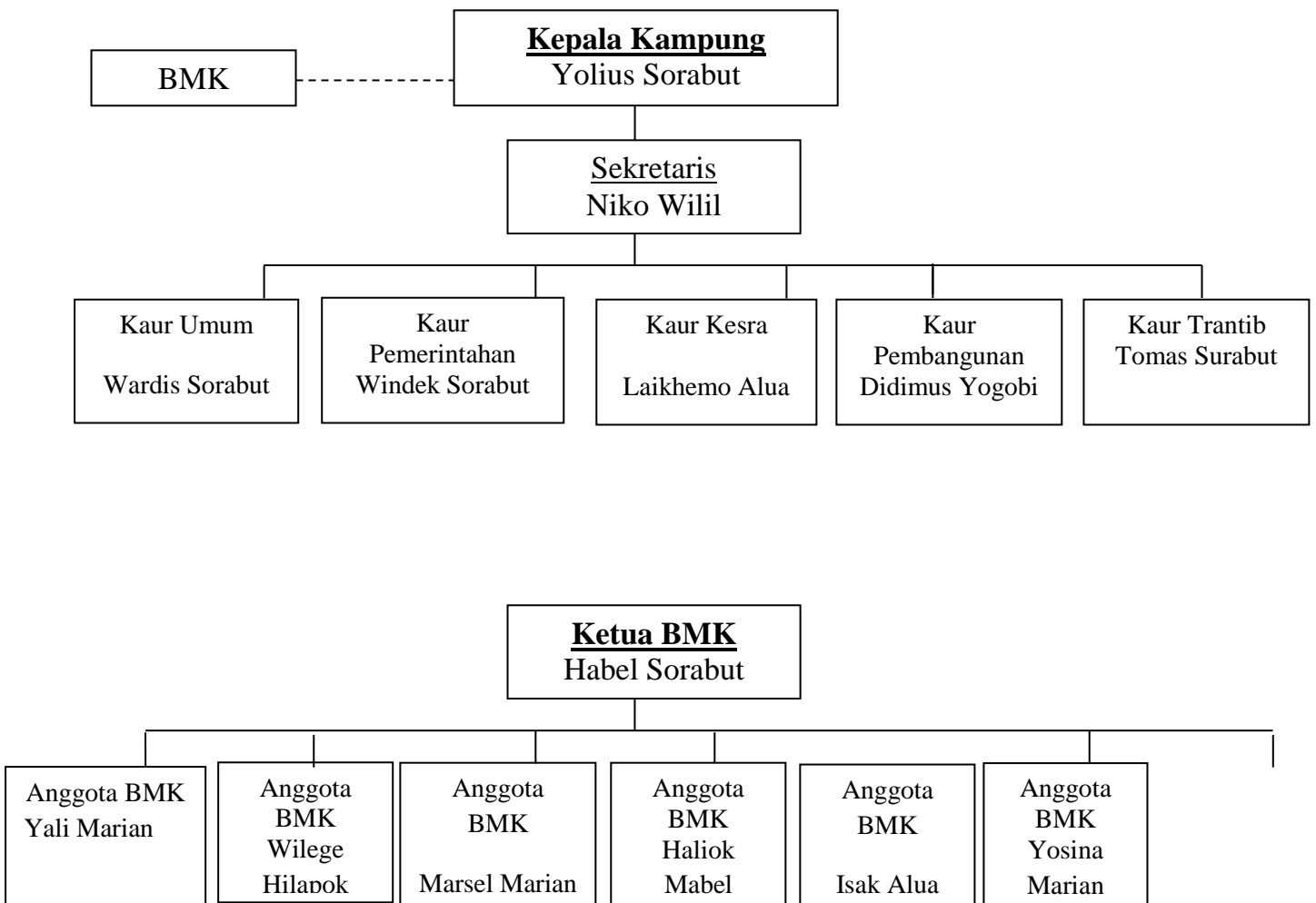
Penduduk Kampung Eragama mempunyai mata pencaharian rata-rata adalah berkebun dan berternak. Hasil kebun berupa

sayur-sayuran dan umbi-umbian yang dijual dan dikonsumsi sendiri. Hewan yang diternakkan adalah babi.

d. Pemerintahan Kampung Eragama

Struktur organisasi pada Kampung Eragama disajikan pada gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Eragama



Keterangan : _____ garis komando
 ----- garis koordinasi

Sumber data : Kantor Kampung Eragama, 2019

a. Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi kampung Eragama

Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung mempunyai wewenang (sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2008)

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BMK
- b) Mengajukan rancangan peraturan kampung
- c) Menetapkan peraturann kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BMK
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kampung mengenai APB kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BMK
- e) Membina kehidupan masyarakat kampung
- f) Membina perekonomian kampung
- g) Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif
- h) Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban kepala kampung, adalah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu, kewajiban kepala kampung untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BMK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat.

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala kampung. Sekretaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Sekretaris kampung mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah

- b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah kampung dan kemasyarakatan
- c) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga kampung, surat-menyurat dan kearsipan
- d) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
- e) Menyusun laporan pemerintah kampung
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung
- g) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kampung dibantu 2 orang staf, yaitu staf umum dan staf keuangan

Unsur teknis, berada di bawah kepala kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung. Unsur teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur teknis terdiri dari :

- 1) Umum
- 2) Urusan pembangunan
- 3) Urusan kesejahteraan rakyat
- 4) Urusan pemerintahan

b. Peran, Fungsi dan Tugas Badan Musyawarah Kampung (BMK)

1. Peran BMK

Peran BMK adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan di penuhiya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin.

2. Fungsi BMK

- a) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
- b) Pusat Pengembangan aturan

- c) Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan
- d) Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan
- e) Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
- f) Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa
- g) Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak ketiga (chanelling).

3. Tugas Pokok BMK

Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

- a) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan misi, visi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan (pronangkis).
- b) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BMK , termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat di penanggulan kemiskinan di wilayahnya.
- c) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
- d) Memperivikasi penilaian yang telah di lakukan oleh unit-unit pelaksanaan dan memutuskan proposal mana yang di

prioritaskan di danai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BMK , atas dasar kreteria dan prosedur yang di sepakati dan di tetapkan bersama.

- e) Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunannya di pedesaan.
- f) Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis.
- g) Membangun transparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media, seperti pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka dan lainnya.
- h) Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui aditor external/independen serta menyebar luaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
- i) Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan di hadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggung jawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
- j) Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan control terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, dan keuangan yang di bawah kendali BMK .
- k) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan

kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan setempat, untuk dapat di komunikasikan, di koordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

- l) Mengawal penerapan nilai-nilai dasar dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
- m) Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan atau pembangunan pedesaan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).
- n) Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat.
- o) Memfasilitasi *net working* (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada sumber-sumber luar masyarakat setempat

2. Keadaan responden

Keadaan responden di Kampung Eragama dapat dilihat pada tabel – tabel berikut :

a. Keadaan responden berdasarkan usia

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Keadaan responden berdasarkan usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	36 – 40	9	52,94
2.	41 – 45	5	29,42
3.	45 – 50	2	11,76
4.	≥ 51	1	5,88
	Jumlah	17	100

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas terlihat bahwa Usia responden terendah adalah 36 tahun dan usia tertinggi adalah 58 tahun.

Data di atas menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 36 – 40 tahun adalah sebanyak 9 orang (52,94 persen) yang terbanyak, responden dengan usia produktif 41 – 45 tahun sebanyak 5 orang (29,42 persen), usia 45 – 50 tahun sebanyak 2 orang (11,76 persen) dan usia lebih dari 51 tahun sebanyak 1 orang (5,88 persen).

b. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	4	23,53
2.	SMP	3	17,65
3.	SD	10	58,82
	Jumlah	17	100

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas terlihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA merupakan tingkat pendidikan tertinggi dan SD merupakan tingkat pendidikan terendah.

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang (23,53 persen),

SMP dengan jumlah 3 orang (17,65 persen) dan SD dengan jumlah 10 orang (58,82 persen).

c. Keadaan responden berdasarkan status sosial

Keadaan responden berdasarkan status sosial terlihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Keadaan responden berdasarkan status sosial

No.	Status sosial	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Kampung	1	5,88
2.	Sekretaris Kampung	1	5,88
3.	Kepala Urusan (Kaur)	5	29,41
4.	BMK	7	41,17
5.	Pendeta	1	5,88
6.	Kepala Suku	1	5,88
	Jumlah	17	100

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa responden dengan status sebagai kepala kampung sebanyak 1 orang (5,88 persen), sekretaris kampung 1 orang (5,88 persen), Kaur sebanyak 5 orang (29,41 persen), BMK sebanyak 7 orang (41,17 persen), Pendeta 1 orang (5,88 persen) dan Kepala Suku sebanyak 1 orang (5,88 persen).

d. Keadaan responden berdasarkan pengabdian

Keadaan responden berdasarkan pengabdian disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4

Keadaan responden berdasarkan pengabdian

No.	Pengabdian (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	4 – 10	8	47,06
2.	11 – 15	8	47,06
3.	17	1	5,88
	Jumlah	17	100

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas terlihat bahwa pengabdian terendah adalah 4 tahun dan pengabdian paling lama adalah 17 tahun.

Berdasarkan data pada tabel di atas, pengabdian 4 – 10 tahun sebanyak 8 orang (47,06 persen), pengabdian 11 – 15 tahun sebanyak 8 orang (47,06 persen) dan pengabdian 17 tahun sebanyak 1 orang (5,88 persen)

3. Analisa data

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya dengan cara pengamatan dan pembagian kuesioner kepada responden, dengan variabel pengelolaan dana kampung, dan yang diteliti adalah : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

1. Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan

Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK,
Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat
perencanaan

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	4	16	23,53
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	8	8	47,06
Jumlah		17	37	100
	Nilai rata-rata			2,17

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan 23,53 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,76 persen dan tidak baik 47,06 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 2,17; hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan cukup baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan pengelolaan dana kampung cukup baik.

2. Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat

Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6

Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat				
Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	3	12	17,65
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	9	9	52,95
Jumlah		17	34	100
Nilai rata-rata			2	

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat 17,65 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,76 persen dan 52,95 tidak baik.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 2; hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

3. Penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKK) yang dibuat

Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7 Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat				
Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	3	12	17,65

Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,75
Tidak baik	1	9	9	52,95
Jumlah		17	34	100
Nilai rata-rata				2

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat 17,65 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,75 persen dan tidak baik 52,95 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 2; hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan rencana kerja kampung (RKP) yang dibuat kurang baik.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.8
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	3	12	17,65
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	4	8	23,52
Tidak baik	1	6	6	35,29
Jumlah		17	32	100
Nilai rata-rata				1,88

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 17,65 persen; cukup baik 11,76 persen; kurang baik 23,52 persen dan 35,29

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 2,94; hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurang baik.

5. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) disajikan pada tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	3	12	17,65
Cukup baik	3	2	6	11,75
Kurang baik	2	3	6	17,65
Tidak baik	1	9	9	52,95
Jumlah		17	33	100
Nilai rata-rata				1,94

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan kurang baik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) masing-masing sama persentasenya 17,65 persen; cukup baik 11,75 persen; dan tidak baik 52,95 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,94; hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) kurang baik.

b. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan program yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program yang telah ditetapkan disajikan pada tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10
Pelaksanaan program yang telah ditetapkan

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	11	11	64,72
Jumlah		17	29	100
Nilai rata-rata				1,70

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik, cukup baik dan kurang baik pelaksanaan program

yang telah ditetapkan memiliki persentase yang sama 11,76 persen; kurang baik 52,95 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,70; hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang telah ditetapkan kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program yang telah ditetapkan kurang baik.

2. Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama

Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama disajikan pada tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11
Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk
Kepala Kampung Eragama

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	10	10	58,83
Jumlah		17	31	100

Nilai rata-rata

1,82

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama 11,76 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,76 persen dan tidak baik 58,83

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,82; hal ini menunjukkan bahwa koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama kurang baik.

3. Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima

Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima disajikan pada tabel 4.12 di bawah ini :

Tabel 4.12
Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	3	6	17,65
Tidak baik	1	9	9	52,95
Jumlah		17	32	100
		Nilai rata-rata		1,88

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima 11,76 persen, cukup baik dan kurang baik masing-masing memiliki persen yang sama 17,65 persen dan tidak baik 52,95 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,88; hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima kurang baik.

4. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel

Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel disajikan pada tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.13
Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	5	10	29,42
Tidak baik	1	8	8	47,06
Jumlah		17	32	100

Nilai rata-rata

1,88

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan cukup baik pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel memiliki persen yang sama 11,76 persen; kurang baik 29,42 persen; dan tidak baik 47,06 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,88; hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel kurang baik.

5. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib

Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib disajikan pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14

Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	1	3	5,89

Kurang baik	2	3	8	17,64
Tidak baik	1	11	11	64,71
Jumlah		17	30	100
Nilai rata-rata				1,76

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib yaitu 35,29 persen; cukup baik 5,89 persen ; kurang baik 17,64 persen; dan tidak baik 64,71 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,76; hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib kurang baik.

c. Penatausahaan

1. Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung

Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam
pengelolaan dana kampung

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase
----------	-----------	---------------	-------	------------

			(B.F)	
Baik	4	3	12	17,64
Cukup baik	3	1	3	5,89
Kurang baik	2	4	8	23,53
Tidak baik	1	9	9	52,95
Jumlah		17	32	100
Nilai rata-rata				1,88

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung sangat patuh pada ketentuan jam kerja baik jam masuk maupun pulang kerja yaitu 17,64 persen; cukup baik 5,89 persen, kurang baik 17,64 persen dan tidak baik 52,95 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,88; hal ini menunjukkan bahwa penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

2. Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan

Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan disajikan pada tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase
----------	-----------	---------------	-------	------------

			(B.F)	
Baik	4	3	12	17,64
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	3	6	17,64
Tidak baik	1	10	10	58,84
Jumlah		17	31	100
Nilai rata-rata				1,82

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pencatatan setiap transaksi yang dilakukan 17,64 persen; cukup baik 5,88 persen; kurang baik 17,64 persen dan tidak baik 58,84 persen

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,82,; hal ini menunjukkan bahwa pencatatan setiap transaksi yang dilakukan kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan setiap transaksi yang dilakukan kurang baik.

3. Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur

Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17

Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	1	2	5,89
Tidak baik	1	12	12	70,59
Jumlah		17	28	100
Nilai rata-rata				1,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi

maupun nota faktur 11,76 persen; cukup baik 11,76 persen; kurang baik 5,89 persen dan tidak baik 70,59 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,64; hal ini menunjukkan bahwa penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur kurang baik.

4. Penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung

Penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung disajikan pada tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.18
Penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	3	6	17,65
Tidak baik	1	11	11	64,71
Jumlah		17	28	100
Nilai rata-rata				1,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung 11,76 persen; cukup baik 5,88 persen; kurang baik 17,65 persen dan tidak baik 64,71 persen

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,64; hal ini menunjukkan bahwa penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan buku kas dalam pelaporan dana kampung kurang baik.

5. Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang disajikan pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19
Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	4	8	23,53
Tidak baik	1	10	10	58,83
Jumlah		17	29	100
		Nilai rata-rata		1,71

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang 11,76 persen; cukup baik 5,88 persen; kurang baik 23,53persen dan tidak baik 58,83 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,71; hal ini menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang kurang baik

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang kurang baik.

d. Pelaporan

1. Pelaporan pengelolaan dana kampung

Pelaporan pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.20
Pelaporan pengelolaan dana kampung

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	3	6	17,64
Tidak baik	1	11	11	64,71
Jumlah		17	28	100
	Nilai rata-rata			1,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pelaporan pengelolaan dana kampung 11,76 persen; cukup baik 5,88 persen; kurang baik 17,64 persen dan yang menjawab tidak baik 64,71 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,64; hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan dana kampung kurang baik

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana kampung kurang baik.

2. Pelaporan dilakukan secara periodik

Pelaporan dilakukan secara periodik disajikan pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21
Pelaporan dilakukan secara periodik

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	1	2	5,89
Tidak baik	1	12	12	70,59
Jumlah		17	28	100

Nilai rata-rata

1,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pelaporan dilakukan secara periodik 11,76 persen; cukup baik 11,76 persen ; kurang baik 5,89 persen dan tidak baik 70,59 persen,

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,64; hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan secara periodic kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pelaporan dilakukan secara periodic kurang baik dilakukan.

3. Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu

Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu disajikan pada tabel 4.22 sebagai berikut :

Tabel 4.22
Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	4	8	23,53
Tidak baik	1	10	10	58,83
Jumlah		17	29	100
Nilai rata-rata				1,70

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik pelaporan dilakukan dengan tepat waktu 11,76 persen; yang menjawab cukup baik 5,88 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 23,53 persen dan yang menjawab tidak baik 58,83 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,70; hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan kurang tepat waktu

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa pelaporan dilakukan kurang tepat waktu.

4. Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik

Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik disajikan pada tabel 4.23 sebagai berikut :

Tabel 4.23

Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
----------	-----------	---------------	-------------	------------

Baik	4	12	48	70,59
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah		17	62	100

Nilai rata-rata 3,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik sebanyak 12 orang atau 70,59 persen; yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang 17,65 persen; dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau 11,76 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,64; hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik baik.

5. Kepala kampung melaporkan kepada Bupati

Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati disajikan pada tabel 4.24 sebagai berikut :

Tabel 4.24
Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	12	48	70,59
Cukup baik	3	3	9	17,65
Kurang baik	2	2	4	11,76
Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah		17	62	100
		Nilai rata-rata		3,64

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.24 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati sebanyak 12 orang atau 70,59 persen; yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang 17,65 persen; dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau 11,76 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,64; hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati dengan baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati baik.

e. Pertanggungjawaban

1. Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung

Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.25 sebagai berikut :

Tabel 4.25
Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	2	8	11,76
Cukup baik	3	2	6	11,76
Kurang baik	2	3	6	17,65
Tidak baik	1	10	10	58,83
Jumlah		17	30	100
		Nilai rata-rata		1,76

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung 11,76 persen; yang menjawab cukup baik 11,76 persen; dan yang menjawab kurang baik 17,65 persen dan tidak baik 58,83 persen

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,76; hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung kurang baik.

2. Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis

Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis disajikan pada tabel 4.26 sebagai berikut :

Tabel 4.26
Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	6	24	35,29
Cukup baik	3	6	18	35,29
Kurang baik	2	5	10	29,42
Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah		17	52	100
	Nilai rata-rata			3,05

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.26 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan cukup masing –masing dijawab oleh 6 orang atau 35,29 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang 29,42 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,05; hal ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan dilakukan secara tertulis baik

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis baik.

3. Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka

Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka disajikan pada tabel 4.27 sebagai berikut :

Tabel 4.13

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	6	4	35,29
Cukup baik	3	6	18	35,29
Kurang baik	2	5	10	29,42
Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah		17		100
	Nilai rata-rata			3,05

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.27 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan cukup baik pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka masing –masing dijawab oleh 6 orang atau 35,29 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang 29,42 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,05; hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka baik

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka baik.

4. Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman

Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman disajikan pada tabel 4.28 sebagai berikut:

Tabel 4.28

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	1	4	5,89
Cukup baik	3	2	6	11,76

Kurang baik	2	8	16	47,06
Tidak baik	1	6	6	35,29
Jumlah		17	32	100
Nilai rata-rata				1,88

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.28 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman sebanyak 1 orang atau 5,89 persen; yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang 11,76 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 8 orang atau 47,06 persen dan yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang atau 35,29 persen.

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,88; hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman kurang baik.

5. Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung

Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.29 sebagai berikut :

Tabel 4.29

Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung

Kategori	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Nilai (B.F)	Persentase
Baik	4	3	12	17,64
Cukup baik	3	1	3	5,88
Kurang baik	2	2	4	11,76

Tidak baik	1	11	11	64,71
Jumlah		17	30	100
Nilai rata-rata				1,76

Sumber data : diolah dari data primer, 2019

Dari tabel 4.29 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik 17,64 persen; cukup baik 5,88 persen, kurang baik sebanyak 11,76 persen dan tidak baik 64 71 persen

Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,76; hal ini menunjukkan bahwa laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1. maka dapat dinyatakan bahwa laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

B. Pembahasan

Dari penyajian data secara tabulasi/analisa data dari ke lima indikator pengelolaan dana kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya, maka langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Perencanaan

Nilai rata- rata indikator perencanaan disajikan pada tabel 4.30 di bawah ini :

Tabel 4.30
Nilai rata-rata indikator perencanaan

No. Item	Perencanaan yang diukur	Nilai rata-rata	interpretasi
1	Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan	2,17	Baik
2	Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK,	2	Kurang Baik

	Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat		
3	Penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKP) yang dibuat	2	Kurang baik
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1,88	Kurang baik
5	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)	1,94	Kurang baik
	Jumlah		9,99
	Nilai rata-rata	1,99	baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Dari tabel 4.30 di atas menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung rata-rata sebesar 1,99. Hal ini menunjukkan perencanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan dengan skor 2,17 (baik); Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dengan skor 2 (kurang baik); penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKP) yang dibuat dengan skor 2 (kurang baik); penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan skor 1,88 (kurang baik) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) dengan skor 1,76 (kurang baik)

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1, maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Dari tabel 4.30 di atas terlihat bahwa Penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKP) yang dibuat paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil pengukurannya adalah Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan dan

Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat.

2. Indikator Pelaksanaan

Nilai rata-rata indikator pelaksanaan disajikan pada tabel 4.31 sebagai berikut :

Tabel 4.30
Nilai rata-rata indikator pelaksanaan

No. Item	Pelaksanaan yang diukur	Nilai rata-rata	interpretasi
1	Pelaksanaan program yang telah ditetapkan	1,70	Kurang Baik
2	Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama	1,82	Kurang Baik
3	Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima	1,88	Kurang Baik
4	Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel	1,88	Kurang baik
5	Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib	1,76	kurang baik
	Jumlah		9,04
	Nilai rata-rata	1,80	Baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Dari tabel 4.31 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama rata-rata sebesar 3,17.

Hal ini menunjukkan pelaksanaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan skor 1,70 (kurang baik); Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama dengan skor 1,82 (kurang baik); Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima dengan skor 1,88 (kurang baik); Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan skor 1,88 (kurang baik) dan Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib dengan skor 1,76 (kurang baik)

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu kurang baik.

Dari tabel 4.31 di atas terlihat bahwa Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil pengukurannya adalah Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel yang mempunyai skor yang sama.

3. Indikator Penatausahaan

nnn Nilai rata-rata indikator penatausahaan disajikan pada tabel 4.32 di bawah ini :

Tabel 4.32
Nilai rata-rata indikator penatausahaan

No.	Penatusahaan yang diukur	Nilai	Interpretasi
Item		rata-rata	
1	Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung	1,88	Kurang Baik
2	Pencatatan setiap transaksi yang	1,82	Kurang Baik

	dilakukan		
3	Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur	1,64	Kurang baik
4	Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung	1,64	Kurang baik
5	Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang	1,71	Kurang baik
	Jumlah		8,69
	Nilai rata-rata	1,73	Cukup baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Dari tabel 4.32 di atas menunjukkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu rata-rata sebesar 1,73. Hal ini menunjukkan penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Kurulu kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung dengan skor 1,88 (kurang baik); Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan skor 1,82 (kurang baik); Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur dengan skor 1,64 (kurang baik); Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung dengan skor 1,64 (kurang baik) dan Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang dengan skor 1,71 (kurang baik).

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1, maka dapat dinyatakan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu kurang baik.

Dari tabel 4.32 di atas terlihat bahwa Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang dan Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil pengukurannya adalah Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung.

4. Indikator Pelaporan

Nilai rata-rata indikator pelaporan disajikan pada tabel 4.33 di bawah ini :

Tabel 4.33
Nilai rata-rata indikator pelaporan

No. Item	Pelaporan yang diukur	Nilai rata-rata	Interpretasi
1	Pelaporan pengelolaan dana kampung	1,64	Kurang Baik
2	Pelaporan dilakukan secara periodik	1,64	Kurang Baik
3	Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu	1,70	Kurang Baik
4	Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik	3,64	Baik
5	Kepala kampung melaporkan kepada Bupati	3,64	Baik
	Jumlah		12,26
	Nilai rata-rata	2,45	Cukup Baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Dari tabel 4.33 di atas menunjukkan bahwa pelaporan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu rata-rata sebesar 2,45. Hal ini menunjukkan pelaporan pengelolaan dana kampung cukup baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Pelaporan pengelolaan dana kampung dengan skor 1,64 (kurang baik); Pelaporan dilakukan secara periodik dengan skor 1,64 (kurang baik); Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu dengan skor 1,70 (kurang baik); Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik dengan skor 3,64 (baik) dan Kepala kampung melaporkan kepada Bupati dengan skor 3,64 (baik)

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1, maka dapat dinyatakan bahwa pelaporan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu cukup baik

Dari tabel 4.33 di atas terlihat bahwa Pelaporan pengelolaan dana kampung paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil pengukurannya adalah Pelaporan dilakukan secara periodic, Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik, dan Kepala kampung melaporkan kepada Bupati dengan skor yang sama.

5. Indikator Pertanggungjawaban

Nilai rata-rata indikator pertanggungjawaban disajikan pada tabel 4.34 di bawah ini :

Tabel 4.34
Nilai rata-rata indikator pertanggungjawaban

No. Item	Pertanggungjawaban yang diukur	Nilai rata-rata	interpretasi
1	Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung	1,70	Kurang baik
2	Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis	3,05	Baik

3	Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka	3,05	Baik
4	Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman	1,88	Kurang baik
5	Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung	1,76	Kurang baik
	Jumlah	11,44	
	Nilai rata-rata	2,28	Cukup baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Dari tabel 4.34 di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Ergama Distrik Kurulu rata-rata sebesar 2,71. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung cukup baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung dengan skor 1,70 (kurang baik); Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dengan skor 3,05 (baik); Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka dengan skor 3,05 (baik); Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman dengan skor 1,88 (kurang baik) dan Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung pagi dengan skor 1,76 (kurang baik)

Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasi dengan tabel 3.1, maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung baik.

Dari tabel 4.34 di atas terlihat bahwa Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil pengukurannya adalah Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis

dan Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka dengan skor yang sama.

6. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator penelitian

Rekapitulasi nilai rata-rata indikator penelitian disajikan pada tabel 4.35 sebagai berikut :

Tabel 4.35
Rekapitulasi nilai rata-rata indikator pengelolaan dana kampung

No.	Indikator	Nilai rata-rata	Interpretasi
1	Perencanaan	1,99	Kurang Baik
2	Pelaksanaan	1,80	Kurang Baik
3	Penatausahaan	1,73	Kurang baik
4	Pelaporan	2,45	Cukup Baik
5	Pertanggungjawaban	2,28	Cukup baik
	Nilai rata-rata	2.05	Cukup baik

Sumber data : olahan data primer, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.35 di atas menunjukkan hasil rata-rata variabel pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu diperoleh skor sebesar 3,01 yang berada pada predikat baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 1,99; pelaksanaan dengan skor 1,80; penatausahaan dengan skor 1,73; pelaporan dengan skor 2,45 dan pertanggungjawaban dengan skor 2,28.

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan awal peneliti terhadap pengelolaan dana kampung, yang mana diperoleh data bahwa pengelolaan dana kampung kurang berjalan baik, namun perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan merupakan indikator yang sesuai dengan pengamatan awal di mana kurang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan dana kampung dari indikator perencanaan di Kampung Eragama cukup baik, dibuktikan dengan keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK dan perwakilan tokoh agama, pemuda dan masyarakat dalam rapat penyusunan rencana. Hal lain mendukung adalah adanya RKK, RPJMK, dan RAPBK dalam bentuk dokumen yang dibuat bersama.

Hasil penelitian dari indikator Pelaksanaan kurang baik, program yang telah ditetapkan dan Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel yang mempunyai skor kurang baik, namun paling tinggi diantar sub indikator lainnya.

Hasil penelitian dari indikator penatausahaan dana kampung di Kampung Eragama kurang baik, dibuktikan dari Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur dan Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung dengan skor paling rendah.

Hasil penelitian dari indikator pelaporan pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama cukup baik, dibuktikan dari pelaporan dilakukan dengan tepat waktu dengan melaporkan kepada Kepala Distrik dan Bupati.

Hasil penelitian dari indikator pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama cukup baik, dibuktikan dengan Kepala Kampung mampu menjelaskan pengelolaan dana kampung, baik dalam menyampaikan laporan tertulis, baik dalam transparansi, namun kurang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kampung, serta kejujurannya yang masih dianggap kurang oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan dana kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu diperoleh nilai rata-rata 2,05 yang menunjukkan pengelolaan dana kampung cukup baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 1,99; pelaksanaan dengan skor 1,88; penatausahaan dengan skor 1,73; pelaporan dengan skor 2,45 dan pertanggungjawaban dengan skor 2,28.

Pada penelitian ini indikator tertinggi berada pada indikator pelaporan dengan nilai skor 2,45 dengan sub indikator tertinggi adalah Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik, dan Kepala kampung melaporkan kepada Bupati.

Indikator terendah berada pada indikator penatausahaan dengan skor 1,73 dengan sub indikator terendah adalah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang dan Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung dengan skor 1,64.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Penatausahaan

Perlu adanya penyediaan buku besar untuk mencatat dan melaporkan segala transaksi yang dilakukan

2. Pertanggungjawaban

Perlu adanya papan pengumuman yang disediakan bagi masyarakat agar dapat mengetahui pengelolaan dana kampung

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aidil, Amanda Fitra, 2016 melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)* (halaman 24)
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Afdi Nizar, Mohammad, 2004, *Kamus Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta
- Atmosudirjo, S Prajudi, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Administrasi dan Manajemen Umum*, Karya Kencana, Yogyakarta
- Tjokroadmudjoyo, Bintoro, *Pengelolaan Pendapatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ferdinand, Augusty, 2011, *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, Edisi 3*, AGF Books, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016, Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Jurnal
- Handoko, T Hani, 2008, *Manajemen*, Edisi ke II, BPFE, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Tim Penyusun Pusat Kamus, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartika et al, 2018 melakukan penelitian yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja*” (halaman
- Komaruddin, 2008, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara , Jakarta
- Murniati, Mukhlisi, 2005, *Sakinah Finance : Pengelolaan Keuangan*, Tinta Medina, Jakarta
- Ngongare, 2016, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan* (halaman 5)
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Putra, Hendi 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo kabupaten Kediri*, Journal Unair, Universitas Airlangga

- Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang* (halaman 23)
- Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Deepublish, Jakarta
- Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, 1994, *Pengelolaan Aset*, Alih Bahasa Dwi Helly, Gramedia, Jakarta
- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke 10, Bumi Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 2002, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama , Bandung
- Syahrul, 2002, *Analisa Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Westra, Pariata, 2003, *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016, “*Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul* (halaman 4)

B. Dokumen

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya, No. 4 tahun 2007 Mengenai Penggunaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung
- Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 4 tahun 2016 mengenai pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran : 1

A. Identitas Responden

No. responden :.....

Usia :.....

Tingkat pendidikan :.....

Pangkat/golonga :.....

Masa kerja :.....

B. Daftar pernyataan

DAFTAR PERNYATAAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

No.	Daftar Pernyataan	Jawabab Responden			
		Tidak baik	Kurang baik	Cukup baik	Baik
A. Indikator Perencanaan					
1.	Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan				
2.	Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat				
3.	Penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKP) yang dibuat				
4.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)				
5.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)				

B. Indikator Pelaksanaan		Tidak baik	Kurang Baik	Cukup baik	Baik
1.	Pelaksanaan program yang telah ditetapkan				
2.	Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama				
3.	Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima				
4.	Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel				
5.	Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib				
C. Indikator Penatausahaan		Tidak baik	Kurang baik	Cukup Baik	Baik
1.	Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung				
2.	Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan				
3.	Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur				
4.	Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung				
5.	Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang				
D. Indikator Pelaporan		Tidak baik	Kurang baik	Cukup Baik	Baik
1.	Pelaporan pengelolaan dana kampung				
2.	Pelaporan dilakukan secara periodic				
3.	Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu				
4.	Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik				

5.	Kepala kampung melaporkan kepada Bupati				
E. Pertanggungjawaban		Tidak baik	Kurang baik	Cukup baik	Baik
1.	Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung				
2.	Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis				
3.	Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka				
4.	Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman				
5.	Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung				

Lampiran : Pengantar Kuisisioner

Pengantar Kuisisioner

A. Petunjuk

Bapak/Ibu yang saya hormati, sebelum menjawab pernyataan di bawah ini, saya mohon perhatiannya atas beberapa hal, yaitu :

1. Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan cermat
2. Silanglah/ contrenghlah pada salah satu jawaban yang tersedia menurut pendapat Bapak/Ibu
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan jawaban secara obyektif
4. Jawaban Bapak/Ibu sangat berguna bagi saya untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar pernyataan ini, saya sangat menghargai dan menjamin kerahasiaannya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih

Peneliti

AGUS SURABUT

Tabel 1
Identitas Responden

No. resp.	Usia (tahun)	Tingkat pendidikan	Jabatan	Masa Kerja (Tahun)
1	41	SD	Anggota BMK	9
2	37	SD	Anggota BMK	4
3	38	SMP	Kaur Kesra	5
4	40	SD	Kaur Pemerintahan	10
5	46	SD	Anggota BMK	12
6	48	SD	Anggota BMK	10
7	42	SD	Anggota BMK	8
8	38	SMA	Pendeta (tokoh Agama)	4
9	41	SMA	Sekretaris Kampung	14
10	36	SD	Anggota BMK	10
11	43	SMA	Kepala Kampung	14
12	40	SD	Anggota BMK	11
13	58	SD	Kepala Suku (Tokoh Adat)	17
14	40	SMA	Kaur Umum	13
15	43	SMP	Kaur Pembangunan	14
16	39	SMP	Ketua BMK	14
17	38	SD	Anggota BMK	14

Tabel 2
Hasil Pengukuran Indikator Perencanaan

No. resp	Pernyataan																			
	1				2				3				4				5			
	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B
1				√				√			√			√				√		
2				√		√				√					√		√			
3				√				√			√				√				√	
4			√					√				√				√				√
5				√		√			√					√						√
6		√					√					√			√					√
7				√			√			√					√					√
8		√						√			√				√				√	
9		√				√					√			√				√		
10				√			√				√				√					√
11				√				√			√					√			√	
12				√				√			√				√				√	
13		√					√					√			√			√		
14				√			√			√					√				√	
15				√				√			√				√				√	
16			√					√			√			√				√		
17			√					√		√					√					√
Jml	0	4	3	10	0	3	5	9	1	4	9	3	0	4	10	3	1	4	6	6

Tabel 3

Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan

No. resp	Pernyataan																			
	1				2				3				4				5			
	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B
1			√				√		√						√			√		
2			√				√			√					√				√	
3				√			√				√				√			√		
4			√				√				√			√		√				
5				√		√				√			√			√		√		
6				√			√		√				√						√	
7			√				√				√				√		√			
8				√			√			√			√			√				
9		√				√				√				√				√		
10			√				√				√				√			√		
11			√				√			√					√				√	
12			√				√			√				√				√		
13				√			√				√			√			√			
14				√			√				√			√					√	
15				√			√			√			√			√				
16				√			√			√			√			√		√		
17				√			√		√					√					√	
Jml	0	1	7	9	0	2	5	10	0	5	6	6	1	5	5	6	2	3	6	6

Tabel 4
 Hasil Pengukuran Indikator Penatausahaan

No. resp	Pernyataan																			
	1				2				3				4				5			
	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B
1			√			√		√							√	√				
2		√				√			√					√		√				
3			√				√		√					√		√				
4				√			√			√					√	√				
5				√		√				√				√		√				
6				√			√		√					√		√				
7				√		√				√					√		√			
8				√		√			√					√			√			
9		√				√			√					√					√	
10			√				√				√			√		√				
11			√				√			√				√		√		√		
12				√		√					√			√					√	
13			√			√					√			√						√
14			√				√				√			√			√			
15		√				√				√				√		√				
16			√			√			√					√			√			
17				√			√	√						√					√	
Jml	0	3	7	7	0	4	6	7	2	6	5	4	0	9	5	3	8	5	3	1

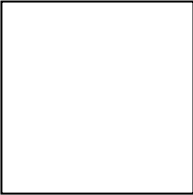
Tabel 5
Hasil Pengukuran Indikator Pelaporan

No. resp	Pernyataan																			
	1				2				3				4				5			
	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B
1			√				√				√				√				√	
2			√				√				√				√				√	
3				√			√				√				√				√	
4			√				√				√				√				√	
5			√				√				√				√				√	
6		√					√	√						√					√	
7		√					√				√				√				√	
8				√			√			√					√				√	
9			√				√			√					√				√	
10			√				√				√				√				√	
11				√			√				√				√				√	
12			√				√				√				√				√	
13				√			√				√				√				√	
14				√			√				√				√			√		
15		√					√				√				√				√	
16		√					√				√				√				√	
17		√					√				√			√				√		
Jml	0	5	7	5	0	0	6	11	1	2	5	9	0	2	3	12	0	2	3	12

Tabel 6
Hasil Pengukuran Indikator Pertanggungjawaban

No. resp	Pernyataan																			
	1				2				3				4				5			
	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B	TB	KB	CB	B
1		√					√				√		√						√	
2		√				√				√				√				√		
3				√			√				√	√							√	
4			√				√				√		√						√	
5			√				√				√	√						√		
6		√					√				√		√					√		
7			√				√				√			√						√
8		√				√				√				√				√		
9		√				√				√				√				√		
10			√			√					√		√							√
11			√				√					√				√				√
12			√				√					√			√					√
13				√			√					√		√						√
14			√				√			√				√					√	
15		√					√				√			√					√	
16			√				√				√				√			√		
17		√				√				√				√				√		
Jml	0	7	8	2	0	5	6	6	0	5	6	6	6	8	2	1	0	7	5	5

BIODATA PENULIS



AGUS SURABUT (23 tahun) dilahirkan di Sikino pada tanggal 3 Agustus 1995. Dari Ayah bernama Wilem Sorabut dan Ibu bernama Yuspina Marian. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Beragama Kristen Katholik

Telah menikah dengan istri bernama Paulina Wamu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Afila Surabut.

Menamatkan pendidikan dasar di SD Inpres Umpakalo Kurulu pada tahun 2008, menamatkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Kurulu pada tahun 2011, dan menamatkan pendidikan akhir di SMA YPPK Santo Thomas pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah YAPIS Wamena.